



Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong

Collaboration of Kampung Government with Tapioca Companies in Preventing Environmental Pollution of Management Cassava

M Fajar Novriansyah*, Maulana Mukhlis, Pitojo Budiono & Ni Kadek Poniasih

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung,
Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kampung dan perusahaan tapioka terhadap penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan hasil pengelolaan limbah singkong. Masalah difokuskan pada kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan tapioka dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari adanya penjemuran hasil pengelolaan singkong yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kampung Sangga Buana Kabupaten Lampung Tengah. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Ansel dan Gash (2007) tentang collaborative governance. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu penjemuran sisa limbah singkong melewati batas batu mutu lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami pencemaran. Terdapat dua jenis batu mutu lingkungan yang terkena pencemaran yaitu baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka sudah berjalan baik dibuktikan dari beberapa indikator yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan share understanding sudah dilakukan. Kajian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi antara pihak pemerintah kampung dan pihak perusahaan dijalankan cukup baik sesuai dengan pemahaman bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak sehingga perusahaan tapioka berkomitmen terhadap perjanjian yang dibuat.

Kata kunci: Singkong; Pencemaran Lingkungan; Kolaborasi.

Abstract

This article aims to find out the collaboration between the village government and tapioca companies in solving environmental pollution problems caused by cassava waste management. The problem is focused on the collaboration of the local government and tapioca companies in solving environmental problems resulting from drying the results of cassava management carried out by some people in Sangga Buana Village, Central Lampung Regency. In order to approach this problem, Ansel and Gash (2007) reference the theory of collaborative governance. The data were collected through interviews and analyzed qualitatively. The results in this study are drying the remaining cassava waste past the environmental quality stone limit. Pollutant elements in the environment pass the established environmental quality standards, so that the environment is polluted. There are two types of environmental quality stones that are affected by pollution, namely water quality standards and ambient air quality standards. The collaboration between the Village Government and the Tapioca Company has been going well, as evidenced by several indicators, namely face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, and sharing understanding. This study concludes that the collaboration process between the village government and the company is carried out quite well in accordance with the mutual understanding developed by both parties so that the tapioca company is committed to the agreement made.

Keywords: Cassava; Environmental Pollution; Collaboration.

How to Cite: Novriansyah, M.F., Mukhlis, M., Budiono, P., & Poniasih, N.K. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung Dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2) 2021: 81-91,

*E-mail: mfajarnovriansyah@gmail.com

ISSN 2722-1148 (Online)



PENDAHULUAN

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang mata pencaharian masyarakatnya dari pertanian. Adapun detail produksi pertanian yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

Tabel 1. Produksi Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 *dalam ton

No	Produksi Pertanian	Jumlah
1	Padi	768.147
2	Ubi Jalar	3.987
3	Kacang Tanah	498
4	Ubi Kayu	2.203.462
5	Jagung	385.424

Sumber : Diolah Peneliti dari BPS (2021)

Bedasarkan tabel 1, ubi kayu merupakan produksi pertanian terbesar di Kabupaten Lampung Tengah atau dalam kata lain rata-rata masyarakat bercocok tanam ubi kayu. Ubi kayu atau yang lebih dikenal dengan singkong merupakan tanaman yang mudah dalam perawatannya dan murah dalam ongkos penanamannya, sehingga efisien antara pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat lebih cenderung memproduksi singkong.

Singkong merupakan bahan baku berbagai produk industri seperti industri makanan, farmasi, tekstil dan lain-lain. Industri makanan dari singkong cukup beragam mulai dari makanan tradisional seperti getuk, timus, keripik, gemblong, dan berbagai jenis makanan lain yang memerlukan proses lebih lanjut didalam singkong terdapa hidrogen sianida (HCN). HCN ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyempitan saluran napas, mual, muntah, sakit kepala, bahkan bisa menimbulkan kematian. Namun dalam jumlah kecil sianida masih dapat ditolerir tubuh yaitu 1mg per kilogram berat. (Higa dalam Hariyanto, 2016).

Industri di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. Salah satu sektor utama Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah industri tepung tapioka, yang tercatat terdapat sebanyak 25 industri. Tapioka adalah salah satu jenis tepung berbahan baku singkong yang banyak dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga atau industri untuk aneka olahan makanan, pembuatan glukosa, dekstrin, dan lain-lain. Singkong merupakan jenis umbi atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, daging umbinya putih atau berwarna kekuning-kuningan (Zaroh dkk, 2019). Singkong sangat melimpah di Kabupaten Lampung Tengah, karena didukung wilayah peladangan yang luas serta tanahnya yang subur seperti penjelasan pada tabel 1 mengenai hasil produksi pertanian di Lampung Tengah.

Industri tepung tapioka di Kabupaten Lampung Tengah salah satunya terletak di Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih, yang merupakan industri pengolahan tepung tapioka yang berskala menengah (pabrik). Perkembangannya memang cukup pesat berawal dari tahun 1990 yang skala produksinya masih home industry berkisar 5-10 ton/hari, sampai sekarang tahun 2021 sudah membesar, yang skala produksinya mencapai 200-250 ton/hari.

Kampung Sangga Buana terdiri dari 6 Dusun, Jumlah kepala keluarga 621 KK. Masyarakat di Kampung Sangga Buana pada umumnya setiap hari berkecimpung di industri tepung tapioka. Letak industri tepung tapioka berada di pinggir Kampung tetapi akses memasuki pabrik berada di tengah pemukiman masyarakat, di wilayah dusun 1 dan dusun. Aktivitas industri tepung tapioka berkaitan erat dengan masyarakat Kampung Sangga Buana, karena dalam kegiatan produksinya keterlibatan masyarakat Kampung Sangga Buana sangat berperan didalamnya, baik sebagai karyawan maupun buruh yang bekerja di pabrik. Hal ini tentu berpengaruh terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Limbah cair dari pabrik membawa sejumlah dan partikel baik yang larut maupun mengendap. Air limbah yang telah tercemar memberikan ciri yang dapat padatan diidentifikasi secara visual dapat diketahui dari kekeruhan, warna air, rasa, bau yang ditimbulkan dan indikasi lainnya.¹ Proses produksi pembuatan tepung tapioka membutuhkan air yang sangat banyak untuk memisahkan pati dari serat, sehingga buangan (limbah cair) yang dihasilkan oleh pabrik tapioka cukup besar yaitu 40-60 m³ per ton tapioca yang diproduksi. Kualitas limbah cair tapioka adalah sebagai berikut: BOD (Biological Oxygen Demand): 3000 - 7500 mg/L, COD (Chemical Oxygen Demand) : 7000 - 30000 mg/L. Pada singkong mentah/pahit kadar hydrogen sianida lebih besar dari 50 mg per kilogram sedangkan untuk yang sudah matang/ manis kadarnya lebih kecil dari 50mg per kilogram.²

Limbah tapioka baik limbah padat maupun limbah cair dapat berdampak buruk. Limbah padat dari pembuatan tapioka mengandung sianida yang dapat mengakibatkan keracunan seperti sakit kepala, sesak nafas, tubuh lemah dan buang air kecil tidak lancar. Penderitanya menyangka kena sakit biasa. Mereka tidak menyadari telah teracuni bahan kimia berbahaya dari sianida yang terkandung didalam singkong. Sedangkan limbah cairnya menyebabkan ribuan ikan mati mengambang di sungai gangga yang mengalir di desa sangga buana. Dampak kerusakan itu butuh waktu beberapa tahun sampai sebuah pabrik diketahui telah mencemari lingkungan. Akibatnya, banyak pihak tidak awas sejak awal. Reaksi baru bermunculan setelah dampak buruknya kasat mata (Hariyanto, 2016).

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait kolaborasi pemerintah dengan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Penelitian pertama oleh Denok Kurniasih dkk (2017) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas, hasil penelitian ini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan *collaborative governance*. Penelitian kedua oleh Denny Irawan (2017) dengan judul *Collaborative Governance* (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemerintahan kolaboratif belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Penelitian ketiga Bambang Hariyanto dan Dian Ayu Larasati (2016) dengan judul Dampak

¹www.chem-Is-Try.org diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 07.30 wib

²<http://klikharry.wordpress.com/2006/12/14/keracunan-sianida> diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 08.00

Pembuangan Limbah Tapioka Terhadap Kualitas Air Tambak Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, tujuan dalam penelitian ini mengetahui sesungguhnya sebaran limbah tapioka perairan Sungai dan untuk mengetahui pola persebaran limbah.

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada penelitian ini, ada beberapa persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai *collaborative governance* dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Berbeda dengan referensi penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan akibat adanya pengelolaan limbah singkong serta kolaborasi yang dilakukan pemerintah kampung dengan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Keberadaan industri tepung Kampung Sangga Buana memiliki dampak fisik dan lingkungan yang di rasa memberikan kerugian bagi manusia, maupun lingkungan yaitu mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar. Kondisi lain yang di alami masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar industri yaitu, pencemaran udara, pencemaran air, suara bising mesin pada saat proses produksi, bau limbah yang tidak sedap, kendaraan pabrik yang merusak jalan. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut keberadaan Industri kadang-kadang kurang dapat diterima masyarakat. Permasalahan pencemaran lingkungan inilah yang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat hanya bersikap acuh terhadap pencemaran yang timbul dari adanya limbah hasil pengelolaan singkong atau yang lebih dikenal dengan nama onggok. Sehingga inilah yang menjadi alasan mendasar penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa limbah hasil pengelolaan singkong menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah kampung dan perusahaan tapioka dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya pengelolaan singkong.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016)

Argumen peneliti melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yaitu karena pengkajian mengenai kolaborasi pemerintah kampung dan perusahaan tapioka dalam mencegah pencemaran lingkungan membutuhkan data yang sifatnya tidak statistik atau tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Sedangkan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini mempunyai masalah yang bersifat deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yaitu penjemuran sisa limbah singkong melewati batas baku mutu lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami pencemaran. Terdapat dua jenis baku mutu lingkungan yang terkena pencemaran yaitu baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Baku Mutu Udara Ambien

Menurut PP No. 41 tahun 1999 tentang pencemaran udara, Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Dari penjelasan tersebut hasil penjemuran hasil pengelolaan singkong atau tapioka mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan sangat mengganggu saluran pernapasan, oleh sebab itu maka pencemaran lingkungan terkait baku mutu udara ambien terjadi pada Kampung Sangga Buana.

2. Baku Mutu Air

Baku mutu air adalah batas aman yang diperbolehkan atau kadar makhluk hidup, zat, energy atau komponen lain yang ada atau unsur pencemar yang masih ditoleransi keberadaannya pada air dan sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Dengan ditetapkannya baku mutu air untuk setiap peruntukannya dan dengan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung secara teoritis beban pencemaran yang dapat ditoleransi keberadaannya oleh badan air penerima sehingga air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Ramadhan & Matondang, 2016). Beban pencemaran adalah banyaknya unsur pencemar yang terdapat didalam air atau air limbah. Proses penjemuran hasil pengelolaan singkong yang dilakukan di perkarangan rumah membuat sisa air pengeringan masuk kedalam tanah, proses ini terjadi terus menerus dan menyebabkan sekarang terdapat sekelompok rumah yang harus membeli air bersih akibat air tanah mereka berbau tak sedap. Hal inilah salah satu contoh pencemaran lingkungan yang terjadi di Kampung Sangga Buana dan termasuk pencemaran air karena telah melewati baku mutu air yang berlaku di Indonesia sesuai PP No. 82 tahun 2001.

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi. Terkait dengan pelaksanaan kolaborasi Pemerintah Kampung Sangga Buana dengan Perusahaan Tapioka dianalisis menggunakan *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2007) dengan tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut :

A. Dialog Tatap Muka (*Face to face*)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung

bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonism dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antara pihak Perusahaan Tapioka Sangga Buana dan pihak Pemerintah Kampung Sangga Buana. Sebagai proses yang berorientasi secara langsung untuk mengidentifikasi peluang untuk kepentingan bersama. Dalam mewujudkan kerjasama, dialog tatap muka atau komunikasi dua arah (timbang balik) antar Pemerintah Kampung dengan perusahaan dalam konteks bertemu dan bermusyawarah untuk mencapai suatu titik terang yang disepakati bersama dan menjadi tanggung jawab bersama (Mashito, 2013). Kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah Kampung dan pihak perusahaan tapioka yaitu menyusun rencana jangka panjang sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan memberikan uang kas kepada Kampung
2. Pihak perusahaan memberikan bantuan terhadap acara yang diadakan oleh Pemerintah Kampung
3. Masyarakat diberikan lapangan pekerjaan di perusahaan
4. Masyarakat Kampung diberikan tunjangan hari raya setiap tahunnya
5. Bantuan perbaikan jalan terhadap jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan yang berkaitan dengan perusahaan
6. Limbah hasil pengelolaan singkong berupa onggok dan kulit singkong diberikan setiap minggu ke peternak sapi yang ada di Kampung.

Sehingga pembentukan kolaborasi antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka dalam hal *dialog face to face* berjalan sangat baik karena dialog yang dicerminkan dari adanya musyawarah yang sering dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka dan juga hasil musyawarah yang ada telah mencerminkan baiknya proses yang terjadi dalam dialog tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut :

“Musyawarah sering dilakukan biasanya setiap tahun selalu ada pembicaraan. Hal-hal yang sering dibicarakan yaitu biasanya terkait dengan keluhan masyarakat dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan keluhan. Musyawarah terakhir mendapatkan kesepakatan bahwa Perusahaan memberikan uang kas kepada Kampung, bantuan terhadap acara Kampung, lapangan pekerjaan untuk masyarakat, bantuan terhadap masyarakat, perbaikan jalan, dan bantuan pakan ternak.”

B. Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang atau tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini dari munculnya permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan oleh kolaborasi antara Pemerintah dan perusahaan (Ngadimin, et.al, 2018). Membangun kepercayaan antara pihak perusahaan tapioka dan Pemerintah Kampung yang dicerminkan dari adanya kesepakatan telah berjalan dari tahun 2007 hingga sekarang. Dengan etika baik Perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari hasil pengelolaan singkong. Pemerintah Kampung dan perusahaan tapioka mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat baik, karena kesepakatan bersama yang dihasilkan tidak dituliskan dalam surat perjanjian akan tetapi setiap kesepakatan telah dijalankan sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara baik walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan dari proses kolaborasi kedua belah pihak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut :

“Hasil musyawarah yang ada tadi, tidak di buatkan surat perjanjian atau hitam diatas putih. Hal ini disebabkan kami percaya terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan dan juga karena didasari dari etika baik Perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di Kampung.”

C. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

Komitmen terhadap hasil musyawarah yang telah dilakukan dijalankan dengan baik, akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul. Salah satu hal penyebab terjadinya permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan yaitu masalah limbah yang banyak merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen terhadap proses kolaborasi dari Pemerintah desa dan pihak perusahaan. Kolaborasi menekankan pada penciptaan hubungan kerjasama yang didasari atas komitmen dalam pencapaian tujuan yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Desa, Masyarakat dan Perusahaan Tapioka (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016).

Bedasarkan wawancara yang telah dilakukan komitmen terhadap proses dilakukan oleh pihak Pemerintah Kampung dan pihak Perusahaan Tapioka. Namun konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun oleh kedua belah antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan tetapi terdapat kelemahan dari kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka yaitu tidak adanya surat perjanjian yang mengikat. Permasalahan yang disebabkan oleh oknum masyarakat yang merugikan perusahaan.

Kemudian terdapat juga masalah yang terjadi karena adanya oknum masyarakat yang bertindak curang dengan meminta hasil pengelolaan singkong dan di perjual belikan secara bebas (Dongoran, et.al, 2018; sari & ritonga, 2016; santifa, et.al, 2019). Dengan adanya hal tersebut menyebabkan komitmen terhadap proses kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan tapioka terkadang terlambat untuk dilaksanakan seperti pemberian ongkok dan kulit singkong. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut :

“Komitmen dijalankan sangat baik antara Perusahaan dan Pemerintah Kampung dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pengelolaan lingkungan. Dibuktikan dengan tadi tidak ada catatan hitam diatas putih atau perjanjian terkait hasil musyawarah yang telah dilakukan. Sehingga komitmen benar-benar dijalankan, tetapi ada permasalahan yang timbul yang merusak komitmen seperti adanya oknum masyarakat yang bertindak curang dengan meminta hasil pengelolaan singkong dan di perjual belikan secara bebas.”

D. *Share Understanding*

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagai pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Indikator *share understanding* atau pemahaman bersama merupakan pemahaman bersama yang tidak hanya sebatas antara pemahaman antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka tetapi juga antara masyarakat, Pemerintah Kampung, dan Perusahaan Tapioka.

Pemahaman terkait dengan menjaga wawasan lingkungan yang berkelanjutan inilah yang terus disosialisasikan oleh Pemerintah Kampung yang bekerja sama dengan perusahaan tapioka. Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik dari setiap komponen kolaborasi termasuk masyarakat sebagai sasaran proses kolaborasi. Masyarakat kunci utama keberhasilan dalam proses kolaborasi, sehingga kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan perusahaan tapioka selalu bertujuan dan memberikan pemahaman tentang wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pemahaman bersama terkait tujuan yang ingin dicapai dari adanya proses kolaborasi, sudah dipahami dengan baik oleh Pemerintah Kampung dan juga perusahaan tapioka. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut :

“Pemahaman terkait masalah lingkungan tidak hanya dipahami oleh Pemerintah Kampung dan juga Perusahaan, akan tetapi masyarakat ikut memahami terkait permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya hasil pengelolaan singkong dan juga hasil kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa mengenai pemahaman akan masalah lingkungan karena hasil pengelolaan singkong yang diketahui masyarakat, tidak semua golongan masyarakat mengetahui dan peduli terkait permasalahan lingkungan yang timbul sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dicerminkan dari

adanya sekelompok masyarakat yang harus membeli air bersih akibat adanya pencemaran air yang ditimbulkan akibat penjemuran hasil pengelolaan singkong di pekarangan rumah. Seperti hasil wawancara terhadap Tokoh Pemuda Kampung Sangga Buana sebagai berikut :

“Tidak semua lapisan golongan masyarakat memahami akibat yang terjadi dari penjemuran hasil pengelolaan singkong seperti pada sekelompok masyarakat yang harus membeli air bersih akibat tercemarnya air mereka. Yang memahami hal tersebut hanya golongan menengah atas dan golongan bawah tidak peduli akibat yang timbul karena faktor ekonomi”

Dampak dari Kolaborasi antara Pihak Pemerintah Kampung dan Pihak Perusahaan yaitu untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Selain menghasilkan tepung tapioka, industri pengolahan tepung tapioka ini juga menghasilkan limbah, yaitu jenis cair, padat. Limbah yang dihasilkan sangat banyak, hasil produksi di pabrik ini dimanfaatkan kembali oleh pabrik ini. Karena limbah tepung tapioka sangat banyak, dan akan menimbulkan pencemaran, apabila limbah itu dibiarkan begitu saja. Karena di setiap pabrik tepung tapioka pasti memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan limbah ini. Di pabrik industri tepung tapioka ini pemanfaatan dari limbah industri tepung tapioka biasanya dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan kulit singkong untuk dijadikan sebagai pakan ternak.
2. Untuk limbah cair yang ada di pabrik ini biasanya langsung dibuang ke sungai, dan apabila ada yang memerlukan untuk dijadikan sebagai pupuk, maka biasanya pabrik ini memberikan limbah cair secara cuma-cuma kepada orang yang memang membutuhkan limbah cair dari industri ini.

Manfaat selanjutnya yaitu limbah-limbah dari pabrik ini mampu diolah dan mampu mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekitar, sehingga lingkungan sekitar tidak tercemar. Dengan adanya pemanfaatan limbah, pabrik ini mendapatkan keuntungan lain, karena limbah-limbahnya dapat dijual belikan kepada masyarakat luas dan anggapan masyarakat terhadap limbah tepung tapioka akan berubah. Manfaat yang lain yang didapat selanjutnya yaitu dapat memberikan masukan kepada masyarakat bahwa proses pengolahan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan serta mendapatkan lebih banyak nilai tambah dengan memanfaatkan hasil sampingnya.

Pencegahan yang dilakukan dari adanya kolaborasi ini yaitu Perusahaan membuat tempat penampungan air limbah dan juga tempat pengeringan hasil pengelolaan singkong yang jauh dari pemukiman warga sekitar, akan tetapi jika warga merupakan buruh terkait proses pengeringan hasil pengelolaan singkong diperbolehkan di halaman rumah dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Pihak Kampung (Hidayat & Nasution, 2013). Sehingga dampak yang terjadi akibat adanya proses kolaborasi Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka mempunyai dampak yang baik untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya penjemuran hasil pengelolaan lingkungan (Suharyanto, et.al, 2019). Permasalahan lingkungan tidak dapat diselesaikan karena proses pengelolaan singkong masih terus berjalan sehingga hasil pengelolaan singkong masih terus akan berdampak terhadap permasalahan lingkungan, akan tetapi kolaborasi ini sangat membantu mengurangi keluhan masyarakat yang ditimbulkan terkait

permasalahan lingkungan yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung dan Tokoh Pemuda Kampung Sangga Buana sebagai berikut:

“Permasalahan lingkungan tidak dapat dihentikan karena proses pengelolaan masih akan terus berjalan. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan akan selalu diminimalisir dengan kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka berdasarkan keluhan yang ada dimasyarakat.”

SIMPULAN

Proses kolaborasi antara pihak pemerintah kampung dan pihak perusahaan cukup baik sesuai dengan pemahaman bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak sehingga komitmen terhadap perjanjian yang dibuat. Potensi dan pemanfaatan limbah industri rumah tangga tepung tapioka memiliki banyak potensi dan memanfaatkan yang positif dilingkungan dengan upaya menanggulangi pencemaran lingkungan sisa hasil dari industri rumah tangga tersebut. Hasil pengelolaan singkong akan selalu berdampak terhadap permasalahan lingkungan, akan tetapi kolaborasi Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka sangat membantu mengurangi keluhan masyarakat yang ditimbulkan terkait permasalahan lingkungan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R and Michael, M. G. (2003). *Collaborative Public Management*. Washington D.C : Goergetown University Press.
- Ansel, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18 (4): 543-571.
- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 76-87.
- Budiati, L. (2012), *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Admnistration Journal*. 8 (1): 47-64.
- Hariyanto, B & Larasati, D. A. (2016). *Dampak Pembuangan Limbah Tapioka Terhadap Kualitas Air Tambak Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati*. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS 2016.
- Hidayat, S., & Nasution, I. (2013). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah Kebakaran, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (2): 176-191.
- Innes, J. & Booher, D. (2003). Collaborative policy making: Governance through dialogue, in: M. Hajer (Ed.) *Deliberative Policy analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge University Press. New York.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Perpustakaan Universitas Airlangga
- Johansson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan- Erik Nylund, Reidar Persson, (2010). Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, *Voluntas*, 21, pp.371-92.
- Kurniasih, D. Setyoko, P. I. & Imron, M. (2017). Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19 (1): 1-7
- Mukhlis, M. (2021). *Kepemerintahan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Idea Press.
- Ngadimin. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 25-37.
- Ngarsiningtyas, S.K., & Sembiring, W.M. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (2): 159-172.
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara

- Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
- Ramadhan, I, & Matondang. A. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4 (2): 173-181.
- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89-98
- Sari, D., & Ritonga. S. (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 65-73
- Sengkey, S. L., Freddy, J., dan Steenie, W. (2011). Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro. *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, 1 (2).
- Sufianti, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non- Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25 (1).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. & Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 162-169.
- Tumengkol, A.R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance. *Jurnal UNSRAT*, III (1).
- Wahyudiantik, Y. (2013). *Collaborative Governance Pengolahan Limbah Sapi (Studi: Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Biogas Di Kabupaten Ngawi)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Zaenuri, M. et al. (2015). Tourism Affairs Management With Collaborative Governance Approach: Tourism Affairs Management Studies In Sleman Regency, Yogyakarta. *International Journal of Management and Administrative Sciences. (IJMAS)*, 02 (06).
- Zaroh, P. F & Widyastuti, S. (2019). Pemanfaatan Limbah Ampas Tapioka Sebagai Bahan Baku Plastik Mudah Terurai (Biodegradable). *Wahana*, 71 (2): 15-22
- Aji, Mukti, 'Masalah Pembangunan Dan Lingkungan', 2008 <<http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/masalah-pembangunan-dan-lingkungan.html>> [accessed 21 Juni 2021]
- www.chem-Is-Try.org diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 07.30 wib
- <http://klikharry.wordpress.com/2006/12/14/keracunan-sianida> diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 08.00